

## RESPON AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA

Geno Vybra Yoga<sup>1</sup>, Bima Jon Nanda<sup>1</sup>, Sofia Trisni<sup>1</sup>

Universitas Andalas<sup>1</sup>

*e-mail*: genovybra29@gmail.com

### ABSTRACT

This research aims to explain the application of the United States deterrence strategy in response to the development of North Korea's nuclear program during the administration of Donald Trump in 2017-2019. As a super power country, he has a responsibility to create and maintain security stability in the world. This research use deterrence as theory. According to Silvia Romeo, the deterrence strategy includes three activities namely persuading the target country to cancel its intention; take action against the target country; and policy changes through changes in government. Qualitative methods applied in this research. The result is that the United States carried out a deterrence strategy against North Korea related to the development of its nuclear program through several measures such as the imposition of economic sanctions, strengthening the defense sector with its allies, South Korea and Japan by reforming the defense cooperation alliance and installing the THAAD defense system in South Korea, and negotiations through the Singapore Summit in 2018 and the Vietnam Summit in 2019. The purpose of this is to realize the denuclearization of North Korea and also as a form of US efforts to maintain its hegemony in the Asia Pacific region.

**Keywords:** *Deterrence, Donald Trump, North Korea, Nuclear, United States*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaplikasian strategi *deterrence* Amerika Serikat dalam merespon pengembangan program nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan presiden Donald Trump tahun 2017-2019. Amerika Serikat selaku negara *super power* dan negara hegemoni dunia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan di dunia. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan kerangka konseptual *eterrence*. Menurut Silvia Romeo, strategi *deterrence* meliputi tiga aktivitas yaitu membujuk negara sasaran untuk membatalkan niatnya; mengambil tindakan terhadap negara sasaran; dan perubahan kebijakan melalui perubahan pemerintah. Pengumpulan data dan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan eksplanatif-deskriptif. Peneliti menemukan bahwa Amerika Serikat melakukan strategi *deterrence* terhadap Korea Utara terkait pengembangan program nuklir miliknya melalui beberapa tindakan seperti pemberlakuan sanksi ekonomi, penguatan sektor pertahanan bersama negara aliansinya yaitu Korea Selatan dan Jepang dengan melakukan reformasi aliansi kerja sama pertahanan serta pemasangan sistem pertahanan THAAD di Korea Selatan, dan perundingan melalui KTT Singapura tahun 2018 dan KTT Vietnam tahun 2019. Tujuan Amerika Serikat melakukan strategi *deterrence* terhadap Korea Utara adalah untuk merealisasikan denuklirisasi Korea Utara dan juga sebagai bentuk upaya Amerika Serikat dalam menjaga hegemoninya di kawasan Asia Pasifik

**Kata Kunci:** Amerika Serikat, *Deterrence*, Donald Trump, Korea Utara, Nuklir

## PENDAHULUAN

Korea Utara merupakan salah satu negara yang mengembangkan program nuklir sejak tahun 1956 ketika menjalin kerja sama penggunaan energi nuklir dengan Uni Soviet. Selain itu, upaya dalam pengembangan program nuklir ini juga dinilai sebagai salah satu bentuk modernisasi dari kekuatan militer yang dimilikinya (William, 2006). Pengembangan program nuklir Korea Utara ini menimbulkan kecemasan dari berbagai lapisan masyarakat internasional, karena diduga berpotensi untuk menjadi aktor yang akan menimbulkan instabilitas di Kawasan Asia Timur. Korea Utara merupakan negara dengan *image* sebagai salah satu negara yang berpotensi menimbulkan krisis di berbagai aspek seperti keamanan dan ekonomi serta kelaparan dan juga kecemasan komunitas internasional dalam memicu munculnya perlombaan senjata (*arm race*) (Purwono dan Zuhri, 2010).

Dalam beberapa dekade terakhir Korea Utara telah melahirkan setidaknya 60 jenis misil dengan kapasitas cakupan yang beragam. Beberapa diantaranya adalah rudal nuklir jenis Hwasong-5, Hwasong-6, Hwasong-7, Hwasong-12, Hwasong-13, Taepodong-1, Taepodong-2 dan sebagainya. Khusus untuk rudal balistik jenis Taepodong-2 memiliki daya ledak lebih kurang 6-8 kiloton dinamit. Tercatat beberapa kali Korea Utara

melancarkan kegiatan uji coba nuklir yang mana diantaranya, yaitu pada tahun 1993 dan 1998.

Pada uji coba ketiga pada tahun 2004, Korea Utara melakukan pengujian pada rudal balistik jenis Taepodong-2 yang pada saat itu memiliki daya ledak mencapai 15 kiloton dinamit yang daya ledaknya melebihi perkiraan yang diprediksi dan hampir sama dengan bom atom tentara sekutu di Hiroshima 1945, dan dilanjutkan pada tahun 2006 dan 2012. Tercatat setidaknya Korea Utara telah melakukan puluhan kali uji coba senjata nuklir (Iriawan, 2017). Beralih kepada negara-negara yang berada di sekitar Korea Utara yang tergabung dalam Kawasan Asia Timur. Tiongkok yang merupakan negara dengan intensitas kerjasama yang tinggi dengan Korea Utara telah menjadi fasilitator berbagai bantuan baik berupa bantuan energi, bantuan pangan dan bantuan ekonomi serta persenjataan militer Korea Utara. Bahkan, Tiongkok sendiri secara tidak langsung mendeklarasikan dukungannya terhadap Korea Utara. Dikutip melalui situs berita BBC dalam tajuk rencana surat kabar Korea Utara, Rodong Sinmun, Presiden Tiongkok Xi Jin Ping menyatakan, "Tiongkok mendukung Korea Utara untuk menjaga arah yang tepat dalam memecahkan persoalan Semenanjung Korea secara politis." (BBC, 2019). Sedangkan negara lain seperti Jepang dan

Korea Selatan merasa bahwa tindakan Korea Utara bukanlah sesuatu yang dapat ditoleransi lagi karena besarnya ancaman yang ditimbulkan. Hal ini terbukti ketika Jepang dan Korea Selatan melakukan reformasi aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat (AS). Aliansi pertahanan memang sudah menjadi fokus investasi AS sendiri sejak pasca perang dingin yang disepakati melalui *bilateral defence alliance* (Iriawan, 2017). Meskipun Korea Utara menyatakan bahwa program nuklir yang dikembangkannya bertujuan hanya sebatas bentuk proteksi diri dan pencegahan, tetap saja hal ini menimbulkan kecemasan tersendiri oleh AS yang mengklaim bahwa hal ini dapat menimbulkan bahkan meningkatkan resiko yang mengancam keamanan nasional dan tidak dapat diterima oleh AS. Kecemasan AS ini bukan sebatas penyerangan langsung yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan oleh Korea Utara saja, namun juga kecemasan terhadap kesediaan Korea Utara untuk menjual senjata nuklir dan bahan fosil yang dikembangkannya kepada organisasi kriminal dan organisasi teroris. AS di bawah pemerintahan Trump mengambil momentum politik dengan menerbangkan pesawat pengebom jenis B-1 milik AS di atas perbatasan dengan Korea Utara dalam rangka latihan gabungan antara AS, Korea Selatan dan Jepang yang berlangsung selama 10 jam (Kumpan, 2019). Tindakan ini mengindikasikan ancaman yang dikeluarkan AS kepada Korea Utara. Selanjutnya, Trump juga memerintahkan pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara melalui perintah eksekutif untuk menutup segala

akses keuangan serta embargo ekonomi (Iriawan, 2017).

AS sebagai negara super power tidak menerima legitimasi kemampuan senjata nuklir Korea Utara yang diperoleh rezim Pyongyang dengan melanggar NPT pada tahun 1970. Oleh sebab itu, tujuan utama AS adalah denuklirisasi terkait program nuklir Korea Utara secara sepenuhnya dan dapat diverifikasi. Namun, AS berusaha mencegah paksaan atau agresi kepada Korea Utara baik pada tingkat konvensional maupun senjata nuklir demi mengurangi resiko salahperhitungan yang berpotensi meningkatkan konflik antar para pengguna senjata nuklir (Einhorn dan Pifer, 2017). Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa AS tengah melakukan strategi deterrence terhadap Korea Utara. Deterrence merupakan strategi yang sangat sering dilakukan oleh negara saat melihat munculnya potensi ancaman. Deterrence adalah strategi yang selama ini telah digunakan dan dipraktekkan oleh AS. Tercatat bahwa AS pernah beberapa kali melakukan deterrence, yang mana diantaranya pada masa perang dingin yang melibatkan Berlin dan Uni Soviet (George dan Sivioke, 1974) Karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana AS melakukan deterrence terhadap Korea Utara guna menciptakan stabilitas keamanan di Asia Timur dan melindungi negara aliansi AS di Asia Timur.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

studi kepustakaan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang berasal dari artikel jurnal, portal berita, dan buku. Sumber data yang dicari akan berfokus pada bahasan mengenai *deterrence*, *THAAD*, interaksi Amerika Serikat dan Korea Utara, nuklir Korea Utara, sanksi-sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis menggunakan kerangka konseptual *deterrence*, agar dapat ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Embargo Ekonomi AS terhadap Korea Utara

AS merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sangat mengecam kebijakan Korea Utara yang tetap melakukan pengembangan program senjata nuklir. Oleh sebab itu, AS selaku negara super power yang juga merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah berupaya untuk merealisasikan denuklirisasi Korea Utara, yang mana salah satunya ialah memberlakukan embargo dan menutup segala akses keuangan yang diperintahkan langsung oleh Presiden Donald Trump terhadap Korea Utara guna untuk membatasi ruang gerak serta meminimalisir kemampuan Korea Utara dalam melakukan pengembangan program nuklirnya (Iriawan, 2017). Pemerintah AS menjatuhkan sanksi-sanksi ekonomi tersebut terhadap Korea Utara dengan tujuan agar sanksi-sanksi tersebut dapat mengakibatkan Korea Utara menghentikan pengembangan program nuklir dan rudal balistiknya, dan kemudian sepakat untuk melakukan perundingan mengenai

denuklirisasi. Meskipun kenyataannya, Korea Utara masih tetap melanjutkan program nuklirnya dikarenakan rasa tidak aman yang dirasakan oleh Korea Utara di kawasan (Permata, 2019). Namun, bagi AS, denuklirisasi merupakan pencapaian yang ditargetkan, karena dengan denuklirisasi tersebut Korea Utara dapat terbebas dari sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan (VOA, 2019). Pada bulan September 2018, AS melalui presiden Trump semakin menunjukkan reaksi yang keras dalam merespon tindakan pengembangan program nuklir serta aktivitas uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Sebelumnya AS juga telah menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk menutup segala akses ekonomi dengan Korea Utara. Bukan hanya memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, namun AS juga mengancam secara jelas setiap negara-negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara. Donald Trump melalui akun Twitternya menyebutkan bahwa AS akan menghentikan semua perdagangan dengan negara manapun yang terlibat bisnis dengan Korea Utara. Pernyataan yang dikeluarkan AS ini mengacu kepada aktivitas uji coba kemampuan bom hidrogen yang dikembangkan oleh Korea Utara pada tanggal 03 September 2018 yang diprediksi bom hidrogen tersebut bisa dijadikan hulu ledak yang dimasukkan ke dalam rudal balistik (ICBM) milik Korea Utara (Detik News, 2019).

Untuk menunjang pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara ini, AS juga menekan agar negara-negara lain untuk tidak terlibat hubungan ekonomi dengan Korea Utara. Hal ini dilakukan AS karena Korea Utara dinilai terus

menggunakan berbagai taktik dan cara untuk terhindar dari sanksi tersebut. Departemen Keuangan AS mengeluarkan pengumuman terkait sanksi yang diberikan terhadap perusahaan asal Tiongkok yang terlibat perdagangan alkohol dan rokok ke Korea Utara dengan melakukan pemalsuan dokumen dan perusahaan Rusia yang menyediakan pasokan dan layanan bongkar muat dan pengisian BBM ke kapal milik Korea Utara. Sanksi ini diberikan kepada perusahaan terkait karena menurut AS perusahaan tersebut secara jelas terbukti melanggar embargo ekonomi terhadap Korea Utara (VOA, 2019). Pada bulan Agustus 2017, PBB juga telah menjatuhkan beberapa bentuk sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Sanksi yang disepakati di tingkat PBB ini sekali lagi merupakan usulan dari AS dalam draf resolusi tersebut. Resolusi ini dicapai setelah AS berhasil memenangkan negosiasi dengan Tiongkok dan Rusia (BBC, 2019). Adapun beberapa sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh DK PBB tersebut ialah, 1) Pelarangan ekspor Korea Utara. Sanksi ini berupa embargo yang melarang Korea Utara untuk melakukan ekspor komoditas tambang miliknya seperti batu bara, timah, biji timah, besi, dan biji besi; 2) Larangan untuk menambah pekerja migran. Hal ini bertujuan agar mencegah bertambahnya jumlah pekerja migran dari Korea Utara di luar negeri, karena pekerja migran ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara Korea Utara; 3) Pelarangan investasi baru. Sanksi ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan Korea Utara, dimana diberlakukannya larangan kerja sama ekonomi serta investasi baru; 4) Bank Valuta Asing Korea Utara yang

masuk daftar hitam. Disini PBB menambahkan setidaknya sembilan pejabat resmi Korea Utara untuk masuk ke dalam daftar hitam, termasuk empat entitas dari Korea Utara yang salah satunya adalah Bank Valuta Asing milik Korea Utara. Hal ini dilakukan untuk menekan kemampuan Korea Utara dalam melakukan pengembangan program nuklirnya dan mendesak agar segera melakukan denuklirisasi (Detik News, 2019).

Selain memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, pada bulan September 2017 AS juga meminta PBB untuk menjatuhkan sanksi embargo bahan bakar minyak ke Korea Utara, serta membekukan aset pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un. AS dan negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan sebuah rancangan resolusi yang menuntut untuk memberlakukan larangan pasokan bahan bakar minyak dan gas serta larangan ekspor tekstil ke Korea Utara. AS juga menyampaikan tuntutan ke PBB untuk mengakhiri pembayaran terhadap pekerja asing di Korea Utara guna untuk memangkas pendapatan ke Korea Utara (Tirto.id, 2019).

Rancangan resolusi yang diusulkan oleh AS ini dinilai akan menjadi salah satu rancangan yang terkuat untuk mendesak Korea Utara menghentikan pengembangan program nuklirnya, karena rancangan resolusi ini mengarah langsung kepada kepemimpinan Korea Utara karena mengusulkan pembekuan terhadap aset milik Kim Jong Un yang juga memimpin Partai Buruh Korea. Pembekuan ini juga akan berdampak terhadap perusahaan penerbangan milik Korea Utara, Air Koryo, Tentara Rakyat Korea dan kelompok

lainnya yang terkait dengan pemerintah, militer dan partai. Selain itu, dalam mewujudkan resolusi yang diusulkan oleh Korea Utara ini, Trump menegaskan bahwa Tiongkok juga akan setuju sepenuhnya dengan apa yang telah diusulkan AS dan Tiongkok juga telah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan AS untuk mengambil tindakan lebih lanjut dengan tujuan merealisasikan denuklirisasi di Semenanjung Korea (Tirto.id, 2019).

Namun, usulan AS terkait embargo bahan bakar minyak terhadap Korea Utara dengan menghentikan sama sekali pasokan minyak ke Korea Utara tidak disetujui untuk masuk kedalam draf resolusi yang diajukan. Hal ini mengingat bahwa apabila embargo bahan bakar minyak itu diberlakukan maka ini akan mematikan perekonomian Korea Utara seluruhnya (Detik News, 2019). Apabila embargo bahan bakar minyak yang diusulkan oleh AS ini disetujui dan diberlakukan, hal ini akan sangat merugikan Korea Utara dan akan mempengaruhi berbagai sektor di Korea Utara itu sendiri dan berpotensi untuk meningkatnya kasus deforestasi.

Meskipun AS dan Korea Utara sempat melakukan perundingan pada KTT AS-Korea Utara pada bulan Februari 2018, Donald Trump selaku pemegang kekuasaan AS menyatakan tidak akan melonggarkan sanksi ekonomi yang diberikan terhadap Korea Utara. Sanksi tersebut masih tetap berlaku. Hal ini disampaikan oleh Donald Trump pasca mewakili AS untuk melakukan perundingan terkait denuklirisasi Korea Utara dengan presiden Kim Jong Un di Hotel Capella, Pulau Sentosa Singapura. Merujuk kepada berbagai sanksi ekonomi

yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Korea Utara tersebut, hampir seluruhnya diprakarsai oleh AS. Ambisi AS dalam mengupayakan denuklirisasi Korea Utara dipicu oleh berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara dengan program pengembangan senjata nuklir dan uji coba rudal balistiknya terhadap kedaulatan serta kepentingan AS di Kawasan Asia Pasifik khususnya Kawasan Asia Timur dan Semenanjung Korea. Bukan hanya itu saja, ancaman yang ditimbulkan oleh nuklir Korea Utara ini juga menimbulkan instabilitas di Kawasan Asia Timur yang secara pasti telah mengancam keamanan negara sekutu AS, yaitu Korea Selatan.

Tercatat bahwasanya pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Donald Trump pada tahun 2017, AS telah meloloskan beberapa sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Akibat sanksi yang dijatuhkan DK PBB melalui AS terhadap Korea Utara ini, setidaknya Korea Utara mengalami penurunan pendapatan dari ekspor tahunannya sebesar lebih kurang US\$ 3 miliar atau setara dengan Rp 39.9 triliun (Tempo.Co, 2019). Hanya saja, menurut penuturan dari pembelot Korea Utara yang menyatakan bahwa di Korea Utara terdapat segelintir orang yang memiliki koneksi dan akses untuk melakukan bisnis mulai dari perdagangan hingga penyelundupan. Orang-orang tersebut dinamakan "kaum donju" yang merupakan pengusaha kaya asal Korea Utara. Mereka merupakan sisi yang tidak terlihat dari faktor pertumbuhan ekonomi Korea Utara yang sampai saat ini masih mampu menjaga eksistensinya. Sistem kerja kaum donju ini yaitu melakukan

bisnis ilegal untuk mendapatkan kekayaan dan kemudian bersedia melakukan peminjaman uang terhadap negara. Dalam melakukan aktivitas ilegalnya, kaum donju mendapat banyak kelonggaran dari pemerintah Korea Utara (Fotokita, 2019). Berdasarkan tindakan AS yang gencar dalam memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara ini berdampak signifikan terhadap pemasukan negara komunis tersebut. Tindakan ini ditujukan untuk membatasi program pengembangan nuklir Korea Utara dan mendesak Korea Utara agar segera melakukan perundingan untuk membahas dan bersedia melucuti segala fasilitas pengembangan nuklirnya. Merujuk kepada konsep deterrence, AS telah melakukan satu dari tiga aktivitas deterrence yaitu mengambil tindakan terhadap negara pelanggar. Tindakan ini diaplikasikan oleh AS dengan bentuk melakukan eksekusi langsung terhadap pemberlakuan sanksi, dan bukan hanya sekedar ancaman. Tindakan AS dalam menjatuhkan sanksi ekonomi ini juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap Korea Utara agar berhenti untuk melakukan pengembangan dan uji coba senjata nuklir. Hanya saja, tindakan AS dalam menjatuhkan sanksi ekonomi terkait pengembangan program nuklir Korea Utara ini belum mampu untuk membuat Korea Utara melakukan denuklirisasi.

### **Penguatan Sektor Pertahanan AS di Wilayah Semenanjung Korea**

Fenomena pengembangan program nuklir dan uji coba rudal balistik oleh Korea Utara dinilai menimbulkan instabilitas keamanan di merupakan

ancaman bagi negara-negara dunia khususnya negara-negara di Kawasan Asia Timur. AS sebagai salah satu negara anggota tetap DK PBB dan juga merupakan pusat hegemoni dunia merasa bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan masalah terkait pengembangan program nuklir Korea Utara ini, apalagi AS juga memiliki kepentingan di Kawasan Asia Pasifik dan keberadaan negara aliansinya di kawasan yang tidak stabil akibat nuklir Korea Utara tersebut. Oleh sebab itu, salah satu tindakan yang diambil oleh AS untuk menekan Korea Utara agar tidak semakin agresif dalam mengembangkan nuklir miliknya adalah dengan memperkuat sektor keamanan di wilayah Semenanjung Korea (Iriawan, 2017).

Meskipun perang terbuka seperti era sebelumnya tidak terjadi, namun hal tersebut kini menjadi semakin kompleks setelah munculnya fenomena dimana Korea Utara yang semakin agresif dalam melakukan pengembangan program nuklir serta uji coba senjata nuklir miliknya. AS kemudian berinisiatif untuk melakukan reformasi sistem pertahanan dengan Korea Selatan dan Jepang guna menekan Korea Utara dalam tindakan-tindakan agresifnya terkait pengembangan nuklir serta untuk menekan Tiongkok sebagai salah satu negara yang menjadi poros utama dari kerja sama Korea Utara baik dalam sektor perdagangan maupun sektor lainnya yang dinilai akan menguntungkan Korea Utara. Tujuan dari reformasi AS bersama dengan Korea Selatan dan Jepang ini adalah sebagai garda terdepan bagi AS dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Semenanjung Korea untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh nuklir Korea Utara. Selain itu, aliansi pertahanan

AS dengan Korea Selatan dan Jepang ini juga sebagai jaminan keamanan bagi negara aliansi AS tersebut, dimana negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang selama ini menjadi negara dengan posisi yang vital bagi hegemoni AS di Asia. Sebelumnya, kerja sama pertahanan AS hanya berada dalam tatanan kerja sama bilateral antara AS dengan Korea Selatan dan AS dengan Jepang yang kemudian disepakati menjadi suatu rancangan kerjasama keamanan bilateral dengan nama *bilateral defense alliance*. Dalam kerja sama bilateral tersebut AS sebagai pemegang peran utama menekankan bahwa hingga 50 tahun kedepan keamanan Kawasan Asia Timur tidak akan terlepas dari pengaruh kebijakan Korea Utara dalam pengembangan program nuklirnya. Namun, kerja sama keamanan bilateral AS dengan Korea Selatan dan Jepang ini kemudian tidak memberikan dampak yang progresif dan signifikan terhadap denuklirisasi Korea Utara (Iriawan, 2017). Fenomena inilah yang mendorong AS untuk melakukan transformasi strategi dari bilateralism menuju aliansi pertahanan yang berbasis trilateralisme. Mekanisme trilateralisme ini dinilai akan lebih efektif dalam menyatukan AS, Korea Selatan, dan Jepang. Aliansi trilateral ini nantinya diproyeksikan akan mampu mencapai berbagai peningkatan kemampuan pertahanan AS, Korea Selatan, dan Jepang. Dari kerja sama trilateral ini nantinya akan menghasilkan berbagai kerja sama pertahanan seperti *joint military exercise, joint patrol, dan military assistance* serta *tracking system* yang akan diperluas dengan memasukkan instrumen *cyber war* dan penyebaran teknologi intelijen yang nantinya akan berguna untuk meretas dan

melacak informasi pengembangan nuklir Korea Utara. Donal Trump sendiri juga menyatakan bahwa *cyber attack* merupakan cara yang akan dikembangkan oleh AS selanjutnya untuk menghentikan pengembangan program nuklir Korea Utara (Oke News, 2019).

AS mengklaim bahwa kerja sama pertahanan trilateralnya dengan Korea Selatan dan Jepang adalah kerja sama pertahanan yang sangat kuat. Hal ini terbukti dari ancaman yang dilemparkan AS terhadap Korea Utara dalam merespon uji coba bom hidrogen. Menteri Pertahanan AS James Mattis menyatakan bahwa ancaman yang diberikan Korea Utara kepada AS dan negara-negara aliansinya melalui uji coba bom hidrogen dan rudal balistik bisa saja berujung dengan balasan militer secara besar-besaran oleh AS dan aliansinya karena AS, Korea Selatan, dan Jepang memiliki kemampuan mempertahankan diri dengan sangat baik. Melalui pers, James Mattis memberikan pernyataan yang berbunyi: "*Any threat to the United States and its territories, including Guam, or our coalitions, will come face to face with dozens of large-scale military, a response that is not only effective but will also be overwhelming*" (BBC, 2019).

Seiring dengan reformasi pertahanan trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang, Menteri Pertahanan AS James Mattis juga sempat melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada bulan Februari 2017 demi membahas mengenai strategi pertahanan negara beraliansi ini kedepannya untuk mempersiapkan uji coba senjata nuklir yang akan dilakukan oleh Korea Utara. Kunjungan James Mattis ini bertujuan untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan

Korea Selatan Ham Min Koo untuk meyakinkan bahwa AS masih menjaga komitmennya untuk membela Korea Selatan dan membantu Korea Selatan dalam mengambil langkah pencegahan dengan memanfaatkan kemampuan militer AS secara penuh. Disamping itu, kunjungan Mattis ke Korea Selatan ini juga membahas mengenai kesepakatan antara AS dan Korea Selatan untuk mengerahkan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) untuk menandingi kemampuan nuklir milik Korea Utara (CNN, 2019). Terminal high altitude area defense (THAAD) merupakan sebuah sistem yang dirancang guna untuk mengantisipasi adanya serangan dari rudal balistik. THAAD menggunakan sistem peluru kendali anti balistik yang dirancang untuk menembak jatuh serangan rudal dengan jarak dekat, sedang, dan menengah. Sederhananya sistem kerja THAAD yaitu mencegat tembakan langsung dari rudal musuh.<sup>39</sup> Sistem THAAD ini dikembangkan oleh AS melalui perusahaan Lockheed Martin Missiles and Space sejak 1992 dan secara resmi menjalin kontrak kerja sama dengan Pemerintahan AS pada bulan Januari 2007. Sistem THAAD dikembangkan dengan memiliki empat komponen peluncur, yaitu rudal, radar, peluncur, dan fire control. Komponen rudal pada THAAD memiliki panjang lebih kurang 6.17 meter dengan berat mencapai 900 kilogram. Rudal ini kemudian dipasangkan pada truk M1075 yang berfungsi sebagai peluncur.

Pemasangan THAAD milik AS di Korea Selatan khususnya di wilayah Songju dimulai pada tahun 2016. Namun, sistem pertahanan THAAD baru mulai di maksimalkan beroperasi pada tahun Mei

2017 setelah adanya kunjungan oleh Menteri Pertahanan AS ke Korea Selatan membahas mengenai THAAD ini (ISDP, 2017). Pemasangan THAAD di Korea Selatan ini merupakan bentuk kerja sama aliansi pertahanan antara AS dan Korea Selatan yang bertujuan sebagai bentuk sistem pertahanan diri di Korea Selatan dari berbagai ancaman di wilayah Semenanjung Korea khususnya ancaman yang timbul oleh program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Sistem pertahanan THAAD milik AS yang di pasang di Korea Selatan ini dilengkapi dengan radar AN/TPY 2 yang mampu menjangkau hingga radius 2000 kilometer yang meliputi wilayah Korea Utara, Tiongkok, dan wilayah Timur Rusia. Selain di Korea Selatan, sistem pertahanan THAAD juga dipasang oleh AS di pangkalan militer miliknya di Guam. Guam sendiri memiliki jarak yang relative sangat dekat dengan wilayah territorial Korea Utara yang hanya berjarak 3500 kilometer. Jarak ini yang membuat AS khawatir karena apabila tidak ada sistem pertahanan yang optimal, maka Guam akan menjadi sasaran empuk apabila Korea Utara melakukan penyerangan nuklir. Selain THAAD, AS juga menempatkan pesawat pengintai bertipe RQ 4B di Guam. Setidaknya, AS telah memasang THAAD sebanyak 7 titik yang tersebar di Korea Selatan, Guam, Hawaii, Rumania, Israel, Uni Emirat Arab, dan Wake Island (Putri, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh nuklir Korea Utara mengharuskan AS untuk mencari dan menemukan strategi baru agar dapat mereduksi potensi ancaman dari Korea Utara tersebut. Desakan bagi AS

tersebutlah yang akhirnya melahirkan reformasi aliansi pertahanan AS dengan negara sekutunya di Kawasan Asia Timur dan pemasangan THAAD. Menurut Menteri Pertahanan AS James Mattis, aliansi pertahanan trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang ini merupakan aliansi pertahanan terkuat dan terbesar di dunia, sehingga dapat meminimalisir berbagai ancaman keamanan seperti halnya yang ditimbulkan oleh nuklir Korea Utara.

Beberapa bentuk tindakan AS dalam melakukan penguatan pada sektor pertahanan yang melibatkan negara-negara aliansinya ini, mencerminkan bahwasanya AS juga berupaya dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan ancaman dari senjata nuklir Korea Utara yang mungkin saja dapat melakukan serangan langsung ke wilayah kedaulatan AS sendiri maupun ke negara-negara aliansinya. Tindakan penguatan sektor pertahanan ini merupakan bentuk pencegahan atau deterrence AS terhadap ancaman nuklir Korea Utara yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas pengambilan tindakan dari strategi deterrence. Penguatan sektor keamanan dan pertahanan ini juga bertujuan untuk menjaga kepentingan AS sebagai negara hegemon dunia, karena Korea Selatan dan Jepang merupakan aliansi AS di Asia yang menjamin keberlangsungan hegemoni AS di kawasan tersebut. Selain itu, tindakan rekonstruksi pertahanan AS bersama negara aliansinya Korea Selatan dan Jepang ini diharapkan dapat menimbulkan efek intimidasi terhadap Korea Utara untuk dapat mereduksi ancaman yang diberikannya dan bahkan bersedia melakukan pelucutan fasilitas pengembangan nuklirnya.

### **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-Korea Utara**

Pada bulan Juni 2018, presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sepakat untuk mengadakan suatu pertemuan yang dijanjikan berlokasi di Pulau Sentosa, Singapura. Pertemuan ini mencapai kesepakatan setelah adanya hubungan yang fluktuatif antara Korea Utara dan AS terkait ambisi masing-masing negara tersebut. Pertemuan antara pemimpin kedua negara ini merupakan pertemuan pertama dalam sejarah yang melibatkan presiden AS dan Korea Utara dalam konteks perundingan bilateral. Selama ini, setiap wacana tentang agenda perundingan kedua negara ini selalu gagal terlaksana. Sikap kooperatif pemimpin Korea Utara ini bersedia mengadakan pertemuan tingkat tinggi membahas kelanjutan nuklir Korea Utara dinilai sebagai suatu babak baru dalam proses denuklirisasi dan interaksi Korea Utara dengan AS. Berdasarkan laporan dari wartawan BBC News di Seoul, Korea Selatan, Laura Bicker menyatakan bahwa Kim Jong Un menginginkan suatu timbal balik yang diberikan oleh AS sebelum program nuklir yang telah dikembangkan Korea Utara selama beberapa dekade terakhir itu dihentikan (BBC, 2019).

Perundingan antara AS dan Korea Utara dalam KTT Singapura tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam satu dokumen perjanjian yang disebut Donald Trump sebagai dokumen yang sangat komprehensif. Adapun kesepakatan yang dicapai meliputi beberapa aspek yang dibagi menjadi beberapa butir yang mana

beberapa diantaranya adalah komitmen Donald Trump untuk memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara dan komitmen Kim Jong Un untuk segera melakukan denuklirisasi, komitmen AS dan Korea Utara untuk menjalin hubungan baru yang lebih baik, dan kerja sama AS dan Korea Utara dalam proses denuklirisasi Korea Utara (CNN, 2018).

Perundingan tingkat tinggi antara AS ini selanjutnya dijadwalkan untuk diadakan kembali pada bulan Februari 2019 di Hanoi, Vietnam. Pertemuan antara pemimpin AS dan pemimpin Korea Utara di Hanoi, Vietnam ini merupakan lanjutan dari KTT Singapura tahun 2018 yang membahas mengenai kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Dalam sesi perundingan di Hanoi, Vietnam ini AS mendesak Korea Utara untuk secara terbuka memberikan daftar lengkap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. AS menuntut hal tersebut karena menurut AS hal tersebut diperuntukkan untuk mempertimbangkan peringanan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea Utara (BBC, 2019). KTT Hanoi yang diselenggarakan pada bulan Februari 2019 tidak menghasilkan kesepakatan apapun antara Korea Utara dan AS. Dalam KTT Hanoi tersebut, proses perundingan selesai lebih cepat dari yang diperkirakan karena tidak menghasilkan titik temu antara kedua negara yang terlibat perundingan tersebut, dan karenanya tidak ada upacara penandatanganan kesepakatan antara kedua pihak setelah AS melakukan penolakan terhadap tuntutan Korea Utara terkait pencabutan semua sanksi yang dijatuhkan ke Korea Utara. Tuntutan Korea Utara terkait

pencabutan sanksi ini ditolak oleh AS karena Korea Utara dinilai belum melakukan sesuatu apapun secara signifikan dalam proses denuklirisasi (BBC, 2019). Kegagalan AS dan Korea Utara dalam mencapai kesepakatan pada KTT Hanoi, Vietnam pada Februari 2019 lalu menjadikan hubungan AS dan Korea Utara yang sempat mengalami peningkatan positif kembali memanas. Hal ini dibuktikan dengan ancaman Korea Utara yang akan meluncurkan rudal dalam waktu dekat, dan menurut surat kabar Chosun Ilbo yang melaporkan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen bahwasanya mereka mendeteksi adanya upaya Korea Utara dalam melakukan pemulihan bagian-bagian di stasiun peluncuran rudal Tongchang-ri yang sebelumnya dilucuti pasca KTT Singapura 2018 (CNBC, 2019). Perundingan yang dilakukan oleh AS dan Korea Utara yang terangkum dalam KTT merupakan salah satu dari beberapa upaya AS dalam merealisasikan denuklirisasi Korea Utara. Meskipun, sejauh ini belum ada strategi *deterrence* dari AS yang serta merta mampu untuk membuat Korea Utara melucuti secara menyeluruh fasilitas pengembangan nuklirnya, namun strategi-strategi *deterrence* AS ini setidaknya mampu mencegah ancaman yang lebih besar yang dipicu oleh Korea Utara terjadi. Perundingan antara AS dan Korea Utara juga merupakan salah satu bentuk dari strategi *deterrence* AS, karena pada prinsipnya *deterrence* merupakan strategi pencegahan yang meliputi beberapa aktivitas yang mana salah satunya adalah membujuk lawan untuk tidak

menebarkan ancaman atau menghentikan niatnya. Hal ini telah terwakilkan dengan adanya KTT yang diadakan oleh dua negara ini. Sifat *deterrence* AS ini sendiri juga dapat terlihat ketika KTT antara AS dan Korea Utara. AS tetap mendesak dan mengancam Korea Utara dengan tidak bersedia melakukan pencabutan sanksi ekonomi sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Korea Utara sebelum adanya tindakan denuklirisasi sepenuhnya seperti yang dituntut oleh AS.

### SIMPULAN

Bentuk tindakan *deterrence* yang dilakukan oleh AS terhadap Korea Utara dapat dilihat dari fenomena-fenomena interaksi dari kedua negara ini yaitu: 1) pemberlakuan sanksi ekonomi oleh DK PBB melalui AS terhadap Korea Utara yang bertujuan untuk menekan perekonomian untuk menghambat Korea Utara dalam melakukan pengembangan program nuklirnya dan akhirnya bersedia untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya; 2) penguatan sektor pertahanan AS, melalui tindakan ini AS juga menjalin kerjasama dengan negara aliansinya Korea Selatan dan Jepang dalam membentuk aliansi pertahanan trilateral. Selain itu, Amerika juga melakukan penguatan sektor pertahanan dengan memasang THAAD yang merupakan sistem pertahanan anti-rudal dengan Korea Selatan untuk mengantisipasi serangan langsung oleh Korea Utara baik ke wilayah kedaulatan AS maupun ke negara-negara aliansinya; 3) perundingan AS dengan Korea Utara melalui KTT. Hal ini bertujuan untuk membujuk Korea Utara agar bersedia

bekerjasama dalam merealisasikan denuklirisasi.

Meskipun AS telah melakukan berbagai tindakan *deterrence* terhadap Korea Utara dalam mencapai denuklirisasi, sampai saat ini masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Hubungan antara Korea Utara dan Amerika juga sempat membaik dan diprediksi akan memasuki tahapan baru yang lebih baik setelah adanya kesepakatan kedua kepala negara ini untuk melakukan perundingan melalui KTT. Hanya saja, perundingan yang dilakukan tersebut juga belum mampu mencapai *bargaining zone* yang disepakati kedua negara ini dan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, setelah KTT Hanoi, Vietnam pada awal tahun 2019 ini AS dan Korea Utara kembali menjalani hubungan yang panas. Hingga saat ini hubungan AS dan Korea Utara masih bersifat fluktuatif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baylis, J., Wirtz, J., & Gray, C. (Eds.). (2018). *Strategy in the contemporary world*. Oxford University Press, USA.
- BBC News Indonesia, (2019) "Lawatan Pertama Xi Jinping ke Korea Utara: Mengapa terjadi Sekarang?" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48704622>
- BBC News.(2017) "DK PBB Jatuhkan Sanksi „Paling keras Sepanjang Satu Generasi“ terhadap Korea Utara".<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40841491>
- BBC News. (2019) "KTT Trump-Kim di Hanoi Berakhir Tanpa Kesepakatan, Upacara Penandatanganan Dibatalkan".

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47400070>

BBC News.(2019) "KTT Trump-Kim di Hanoi: Semua yang Perlu Anda Ketahui".

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47375723>

BBC News. (2017) "Nuklir Korut: Korsel Latihan Rudal, AS Ancam „Pembalasan Militer Besar-besaran".

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41144846>

BBC News. (2018) "Pertemuan Puncak Trump dan Kim Jong Un di Singapura: Empat Hal yang Perlu Diketahui".

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44397662>

Tahir Saleh (2019) CNBC Indonesia. "Astaga! KTT Gagal, Korut Siap Luncurkan Roket".

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190310063500-4-59696/astaga-ktt-gagal-korut-siap-luncurkan-roket>

CNN Indonesia.(2017) "AS-Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Pertahanan".

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170131111603-113-190230/as-korea-selatan-perkuat-kerja-sama-pertahanan>

CNN Indonesia.(2018) "Mengintip Isi Perjanjian Trump dan Kim Jong Un".

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180612151952-106-305567/mengintip-isi-perjanjian-trump-dan-kim-jong-un>

CNN Indonesia.(2019) "Secarik Kertas yang "Menggagalkan" KTT AS-Korut Hanoi".

[https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190330074727-134-](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190330074727-134-381946/secarik-kertas-yang-menggagalkan-ktt-as-korut-di-hanoi)

[381946/secarik-kertas-yang-menggagalkan-ktt-as-korut-di-hanoi](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190330074727-134-381946/secarik-kertas-yang-menggagalkan-ktt-as-korut-di-hanoi)

Detik News.(2017) "Disanksi PBB, ini yang Tidak Boleh Dilakukan Korea Utara".

<https://news.detik.com/internasional/d-3588090/disanksi-pbb-ini-yang-tak-boleh-dilakukan-korea-utara>

Detik News.(2017) "Trump Embargo Negara yang Berbisnis dengan Korea Utara".

<https://news.detik.com/internasional/d-3626925/trump-ancam-embargo-negara-yang-berbisnis-dengan-korut>

Einhorn, R., & Pifer, S. (2017). *Meeting US Deterrence Requirements: Toward a Sustainable National Consensus: a Working Group Report*. Brookings.

Elliott, B. (2003, September). Deterrence theory revisited. In *road safety research, policing and education conference* (pp. 24-26).

Iriawan, S.(2017) Reformasi Aliansi Pertahanan Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara. *International & Diplomacy* Vol. 3 No.1. Hal 104

ISDP,(2017) "THAAD on the Korean Peninsula"

<https://isdpeu/publication/korea-thaad/>

Kumparan,(2017) "Trump Terbangkan Dua Pesawat Bomber B-1 ke Semenanjung Korea".

<https://kumparan.com/kumparannews/trump-terbangkan-dua-pesawat-bomber-b1-ke-semenanjung-korea>

Morgan, P. M. (2003). *Deterrence now* (Vol. 89). Cambridge University Press.

- Permata, I. M. (2019). Analisis Konstruktivisme: Prilaku Korea Utara Terhadap Denuklirisasi. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(2), 104-116.
- Purwono, A., & Zuhri, A. S. (2010). Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional. *SPEKTRUM*, 7(2).
- Putri, N. A. A. (2019). Respon Tiongkok Terhadap Penempatan Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) Amerika Serikat Di Korea Selatan (2016-2018).
- Romeo, S. (2016). Coercive diplomacy, theories and application: a case study on US administration and Libya.
- Slantchev, B. L. (2005). Introduction to International Relations Lecture 8: Deterrence and Compellence. *Lecture, Department of Political Science, University of California–San Diego*.
- Tempo.co.(2017) “Berbagai Sanksi PBB untuk Korea Utara dalam 11 Tahun”. <https://dunia.tempo.co/read/910196/berbagai-sanksi-pbb-untuk-korea-utara-dalam-11-tahun>
- Tirto.Id.(2017) “AS Dorong Embargo Minyak ke Korut untuk Bidik Kim Jong Un.” <https://tirto.id/as-dorong-embargo-minyak-ke-korut-untuk-bidik-kim-jong-un-cv8p>
- Romeo, S. (2016). Coercive diplomacy, theories and application: a case study on US administration and Libya.
- VOA Indonesia.(2018) “Lakukan Transaksi dengan Korut, Perusahaan Rusia dan China Terkena Sanksi AS”. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/lakukan-transaksi-dengan-korut-perusahaan-rusia-dan-china-terkena-sanksi-as/4530785.html>
- VOA Indonesia.(2019) “Sanksi-sanksi Ekonomi Trump Tak Membawa Hasil yang Diharapkan.” <https://www.voaindonesia.com/a/sanksi-sanksi-ekonomi-trump-tak-membawa-hasil-yang-diharapkan-/4901489.html>
- Perry, W. J. (2006). Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 607(1), 78-86.

